

DAFTAR ISI

BAB 10	PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK	191
A.	Sengketa Pajak	191
B.	Keberatan	191
C.	Bahding	191
D.	Gugatan dan Sanggahan	191
E.	Lampiran Peradilan Pajak	191
BAB 11	HUKUM PIDANA PAJAK	219
A.	Ketentuan Pidana Pajak	219
B.	Ketentuan Pidana Pajak	219
C.	Tindak Pidana Pajak	219
D.	Tindak Pidana dalam Bidang PPh, PPN, dan PPNBM	219
E.	Tindak Pidana dalam Bidang PBB	219
F.	Tindak Pidana dalam Bidang Bea Meterai	219
G.	Tindak Pidana dalam Bidang BPHTB	219
H.	Tindak Pidana dalam Bidang Pajak Daerah	219
I.	Tindak Pidana dalam Bidang Pajak	219
J.	Tindak Pidana dalam Bidang Pajak	219
KATA PENGANTAR		vii
DAFTAR ISI		ix
DAFTAR SINGKATAN		xiii
BAB 1	WAJIB PAJAK DAN KUASAWAJIB PAJAK	1
A.	Wajib Pajak	1
B.	Pemungut/Pemotong Pajak	8
C.	Wakil Wajib Pajak	13
D.	Kuasa Wajib Pajak	13
E.	Wakil Wajib Pajak dan Kuasa Wajib Pajak pada Pajak Daerah	16
F.	Hak Wajib Pajak, Kewajiban Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan	17
BAB 2	PENDAFTARAN, PELAPORAN, DAN PENDATAAN	21
A.	Pendaftaran Wajib Pajak	21
B.	Pendaftaran Objek Pajak	25
C.	Pelaporan Perhitungan dan Pembayaran Pajak Pusat	27
D.	Pelaporan Perhitungan dan Pembayaran Pajak Daerah	35
BAB 3	IDENTITAS PERPAJAKAN	37
A.	Identitas Perpajakan dalam Sistem Hukum Pajak Indonesia	37
B.	Nomor Pokok Wajib Pajak	37
C.	Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak (NPPKP)	41
D.	Nomor Objek Pajak (NOP)	41
E.	Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)	43
BAB 4	PEMBAYARAN PAJAK	45
A.	Pelunasan/Pembayaran Pajak	45
B.	Cara Pembayaran Pajak	46
C.	Jangka Waktu Pembayaran Pajak	48
D.	Jatuh Tempo Pembayaran Pajak	58
E.	Sanksi Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak	63
F.	Tempat Pembayaran Pajak	65

G.	Sarana Pembayaran Pajak	67
H.	Bukti Pemotongan dan Pemungutan Pajak	73
I.	Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak	78
BAB 5	PENETAPAN PAJAK	83
A.	Penetapan Pajak dan Penerbitan Surat Ketetapan Pajak	83
B.	Penetapan Pajak dalam Sistem Perpajakan Indonesia	84
D.	Surat Ketetapan Pajak dalam Pengenaan PBB	93
E.	Surat Ketetapan Pajak dalam Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	96
F.	Surat Ketetapan Pajak dalam Pengenaan Pajak Daerah	98
G.	Pembetulan Surat Ketetapan Pajak	101
H.	Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar	105
BAB 6	PENAGIHAN PAJAK	109
A.	Penagihan Pajak	109
B.	Dasar Penagihan Pajak	111
C.	Surat Tagihan Pajak	113
D.	Penagihan Pajak dengan Surat Paksa	118
E.	Pelaksana Penagihan Pajak dengan Surat Paksa	119
F.	Wajib Pajak dan Penanggung Pajak dalam Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa	122
BAB 7	PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA	125
A.	Surat Teguran	125
B.	Surat Paksa	125
C.	Penyitaan	130
D.	Lelang	135
E.	Pencegahan dan Penyanderaan	140
F.	Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus	143
G.	Biaya Penagihan Pajak	144
H.	Hak Mendahului	145
I.	Kedaluarsa Penagihan Pajak	149
BAB 8	PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK	153
A.	Kelebihan Pembayaran Pajak dalam Proses Pemungutan Pajak	153
B.	Pengembalian Kelebihan Pembayaran PPh	154
C.	Pengembalian Kelebihan Pembayaran PPn dan PPnBM	154
D.	Ketentuan Pengembalian Kelebihan Pembayaran PPh, PPN, dan PPnBM	157
E.	Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran PPh, PPN, dan PPnBM	158
F.	Pengembalian PPn yang Tidak Dikonsumsi di Daerah Pabean	166
G.	Pengembalian Kelebihan Pembayaran PBB	169
H.	Pengembalian Kelebihan Pembayaran BPHTB	170
I.	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah	171
BAB 9	PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN	173
A.	Pembukuan	173
B.	Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Asing	175
C.	Pencatatan	178
D.	Norma Penghitungan Penghasilan Neto	179
E.	Pemeriksaan Pajak	181
F.	Penyegelan	188
G.	Pemeriksaan Pajak Daerah	189

BAB 10	PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK	191
A.	Sengketa Pajak	191
B.	Keberatan	192
C.	Banding	204
D.	Gugatan dan Sanggahan	207
E.	Lembaga Peradilan Pajak di Indonesia	208
F.	Pengadilan Pajak	210
G.	Peninjauan Kembali	216
BAB 11	HUKUM PIDANA PAJAK	219
A.	Ketentuan Pidana Pajak	219
B.	Ketentuan Pidana Pajak dalam Undang-undang Perpajakan Indonesia	220
C.	Tindak Pidana Pajak	227
D.	Tindak Pidana dalam Bidang PPh, PPN, dan PPnBM	230
E.	Tindak Pidana dalam Bidang PBB	232
F.	Tindak Pidana dalam Bidang Bea Meterai	233
G.	Tindak Pidana dalam Bidang BPHTB	234
H.	Tindak Pidana dalam Bidang Pajak Daerah	234
I.	Tindak Pidana dalam Rangka Penagihan Pajak	235
J.	Tindak Pidana Pajak yang Dilakukan oleh Pihak Ketiga	236
K.	Tindak Pidana Pajak Oleh Pejabat Pajak	237
L.	Perulangan (<i>Recidivie</i>), Percobaan, dan Penyertaan Tindak Pidana Pajak	239
M.	Sanksi Pidana Pajak	243
N.	Penuntutan Tindak Pidana Pajak yang Dilakukan Oleh Pejabat Pajak	254
O.	Kedaluarsa Penuntutan Tindak Pidana Pajak	254
P.	Pemeriksaan Bukti Permulaan, Penyidikan Pajak, dan Peradilan Tindak Pidana Pajak	254
DAFTAR PUSTAKA		259
TENTANG PENULIS		263

---oOo---